

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Pedata dan administrasi Terhadap Notaris Pejabat Publik: Cet. Ke-2*. (Bandung: Refika Aditama)
- Harahap, M.Yahya. *Segi-segi Hukum perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1986)
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan. 2003)
- Kansil, C.S.T. dan Christine ST Kansil. *Modul Hukum Perdata termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Cetakan ke-7*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. (Tangerang: Alumni, 1986)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1989)
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak – Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Subekti, R dan R.T. Tjitrosudibio. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994)
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1979)

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang – Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- _____. *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- _____. *Undang – Undang nomor 4 tahun 1996 mengenai Hak tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*
- _____. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

- _____. *Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Tanah Jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah* (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5893)
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
- _____. *Lampiran keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah*

C. Jurnal

- Prawira, I Gusti Bagus Yoga, *Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah*. Jurnal IUS Vol. IV Tahun 2016
- Tampubolon, Napoleon dan Gunawan Djajaputra. *Tanggung Jawab Camat sebagai PPAT Sementara dalam Hal Menandatangani Akta Jual-Beli (Contoh kasus Nomor Putusan 44/PDT.G/2014/PN KWG)*. Jurnal Hukum Adigama
- Triashari, N Wagty. *Kekuatan Hukum Persetujuan Suami atau Istri yang dibuat di Bawah Tangan*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol.3 No.3 Tahun 2018
- Yoan, Rizky, et al. *Tanggung Jawab Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara setelah tidak Menjabat lagi Terhadap Akta yang dibuatnya*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum kenotariatan Tahun 2017

D. Kamus

- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1991)

E. Artikel

- Gea, Sionit T. Martin,. *Camat selaku PPAT Sementara adalah Pejabat TUN*. <https://www.martingealawyers.com/2016/05/10/camat-selaku-ppat-sementara-adalah-pejabat-tun/>. diakses pada tanggal 09 April 2020